



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN www.kkp.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DOKUMEN MITIGASI RISIKO LALU LINTAS MEDIA PEMBAWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,**

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan pencapaian indikator kinerja utama dokumen mitigasi risiko lalu lintas media pembawa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan tentang Petunjuk Teknis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dokumen Mitigasi Risiko Lalu Lintas Media Pembawa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);

3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DOKUMEN MITIGASI RISIKO LALU LINTAS MEDIA PEMBAWA.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dokumen Mitigasi Risiko Lalu Lintas Media Pembawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dokumen Mitigasi Risiko Lalu Lintas Hasil Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2023

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN,

ttd.

PAMUJI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu, dan
Keamanan Hasil Perikanan,



Hari Maryadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA
IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENCAPAIAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA DOKUMEN MITIGASI RISIKO
LALU LINTAS MEDIA PEMBAWA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan, dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki visi yaitu Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk “Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Penjabaran visi dan misi pembangunan kelautan dan perikanan, diantaranya adalah: peningkatan kontribusi sector kelautan dan perikanan terhadap perekonomian Nasional, salah satunya antara lain: Sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan meningkat. (*www.kkp.go.id. 2023*)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, bahwa salah satu amanah penyelenggaraan Karantina Ikan adalah ditujukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan Tertentu (HPIK/HPI Tertentu) dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan.

Selanjutnya, tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelaksanaan perkarantinaan dan keamanan hayati ikan diemban oleh Pusat Karantina Ikan (Puskari). Adapun pelaksanaan teknis penyelenggaraan karantina ikan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPT KIPM) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Pusat Karantina Ikan sesuai tugas dan fungsinya dalam mendukung misi KKP tersebut memiliki beberapa sasaran strategis diantaranya adalah Terwujudnya Pengelolaan Kelautan dan Perikanan yang Berdaulat, Akuntabel, dan Berkelanjutan. Salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU)

untuk mencapai sasaran strategis tersebut adalah Dokumen Mitigasi Risiko Lalu Lintas Media Pembawa. Keluaran (*out put*) sesuai target IKU tersebut adalah 6 (enam) dokumen. Oleh karena itu untuk memberikan acuan pelaksanaan kegiatan dan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan maka Puskar perlu menyusun Petunjuk Teknis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dokumen Mitigasi Risiko Lalu Lintas Media Pembawa.

B. Tujuan

Tujuan Petunjuk Teknis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dokumen Mitigasi Risiko Lalu Lintas Media Pembawa yaitu:

1. sebagai acuan bagi Pusat dalam dalam:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan sebagai dasar operasional pelaksanaan tindakan karantina sesuai Undang Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan; dan
 - b. menyusun laporan dan mengukur tingkat capaian IKU Dokumen Mitigasi Risiko Lalu Lintas Media Pembawa.
2. sebagai acuan bagi UPT KIPM pelaksanaan dan pelaporan investigasi hasil pengendalian HPIK/HPI Tertentu atau pelaksanaan tindakan karantina.

C. Sasaran

Sasaran petunjuk teknis ini adalah tercapainya target IKU 6 (enam) Dokumen Mitigasi Risiko Lalu Lintas Media Pembawa yang telah ditetapkan melalui:

1. penyusunan bahan kebijakan terkait mitigasi risiko lalu lintas media pembawa; dan
2. laporan kegiatan investigasi hasil pengendalian penyakit ikan yang dilakukan oleh Pusat dan UPT KIPM tahun 2023.

BAB II MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

- A. Nama Indikator
Dokumen Mitigasi Risiko Lalu Lintas Media Pembawa.
- B. Makna Indikator
Dokumen Mitigasi Risiko Lalu Lintas Media Pembawa adalah dokumen berupa bahan kebijakan atau peraturan terkait implementasi dari Peraturan Pemerintah dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan; kebijakan, kegiatan serta laporan investigasi hasil pengendalian HPIK/ HPI Tertentu atau pelaksanaan tindakan karantina.
- C. Alasan Pemilihan Indikator
Alasan pemilihan indikator adalah:
- a. Terbitnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan mengamanahkan untuk segera menyusun peraturan turunan berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri agar penyelenggaraan Karantina dapat segera terwujud sesuai Undang-undang tersebut;
 - b. Berdasarkan hasil evaluasi data elektronik melalui aplikasi www.rekon.bkipm.id, surveilan, pemantauan, dan monev ke UPT KIPM banyak ditemukan hasil pemeriksaan terhadap Media Pembawa dinyatakan positif HPIK tidak dapat diakses melalui sistem. Maka sebagai upaya pengendalian untuk mencegah penularan atau penyebaran HPIK perlu dilakukan investigasi untuk dapat memastikan penyebabnya sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan sesuai kasus masing-masing;
 - c. Pengendalian penyakit oleh UPT KIPM belum sepenuhnya mampu mencegah pemasukan dan penyebaran HPIK/HPI Tertentu dengan kata lain masih terdapat potensi risiko atau dampak risiko sehingga perlu dilakukan mitigasi risiko untuk mengetahui capaian tingkat pengendalian, hambatan, permasalahan maupun perbaikan dalam pelaksanaan tindakan karantina sehingga potensi risiko tersebut dapat dikurangi atau dihilangkan; dan
 - d. Mendukung Terwujudnya Pengelolaan Kelautan dan Perikanan yang Berdaulat, Akuntabel, dan Berkelanjutan.
- D. Pengumpulan Data dan Penghitungan Capaian IKU
Data capaian IKU dikumpulkan dan dilaporkan secara berkala sesuai hasil kegiatan dan target yang telah ditetapkan. Dokumen Mitigasi Risiko Lalu Lintas Media Pembawa meliputi:
- a. Penyusunan Bahan kebijakan
Data capaian bahan kebijakan adalah dokumen berupa:
 1. Kategori risiko media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK);
 2. Kategori risiko tuna, makarel dan sardine sebagai media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK);
 3. Petunjuk Teknis Investigasi Hasil Pengendalian HPIK/HPI Tertentu;
 4. Petunjuk Teknis Pengawasan dan/atau Pengendalian Keamanan dan Mutu Pakan; dan
 5. Petunjuk teknis indikator kinerja utama efektivitas pencegahan hama penyakit ikan karantina (HPIK) dan pengawasan dan/atau

pengendalian pada kegiatan importasi media pembawa HPIK.

- b. Penyusunan laporan hasil kegiatan Investigasi oleh Tim Pusat
Data capaian penyusunan laporan kegiatan Investigasi oleh Tim Pusat adalah dokumen berupa laporan tahunan yang meliputi data kumulatif hasil pelaksanaan investigasi yang dilakukan oleh Tim Pusat dan evaluasi hasil kegiatan investigasi yang dilakukan oleh UPT KIPM.

BAB III POLA DASAR DAN STRATEGI PELAKSANAAN

Pola Dasar

Pola dasar pencapaian IKU Dokumen Mitigasi Risiko Lalu Lintas Media Pembawa dititikberatkan penyusunan bahan kebijakan sebagai dasar operasional pelaksanaan tindakan karantina baik sebelum pemasukan (*pre border*), pada saat pemasukan (*at border*) maupun setelah pemasukan (*post border*) dan pelaksanaan kegiatan Mitigasi Risiko Lalu Lintas Media Pembawa berupa investigasi hasil pelaksanaan tindakan karantina. Pola dasar kegiatan mitigasi risiko dirancang untuk dapat mencapai sasaran dan output IKU melalui:

1. Melakukan penyusunan Bahan kebijakan sebagai dasar operasional pelaksanaan tindakan karantina;
2. Menyusun laporan kegiatan Investigasi berupa laporan tahunan yang meliputi data kumulatif hasil pelaksanaan investigasi yang dilakukan oleh Tim Pusat dan evaluasi hasil kegiatan investigasi yang dilakukan oleh UPT KIPM; dan
3. Penyediaan anggaran di tahun berjalan, kegiatan baik di Pusat atau di UPT KIPM dalam rangka pencapaian IKU yaitu pelaksanaan penyusunan NSPK dan bahan kebijakan, serta pelaksanaan kegiatan investigasi oleh Tim Pusat maupun UPT KIPM.

A. Strategi Pelaksanaan

Strategi dasar pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian IKU Dokumen Mitigasi Risiko Lalu Lintas Media pembawa melalui:

1. Penyusunan dan sosialisasi petunjuk teknis pencapaian IKU sebagai acuan pelaksanaan kegiatan di Pusat dan UPT KIPM, sehingga dapat dilaksanakan dengan tepat sesuai tujuan dan sasaran;
2. Penyusunan bahan kebijakan:
 - a. Pembentukan Tim Penyusun; dan
 - b. Koordinasi dengan pihak terkait atau narasumber.
3. Penyusunan laporan hasil kegiatan Investigasi:
 - a. Pembentukan Tim Pelaksana;
 - b. Melakukan pengumpulan data, evaluasi dan pelaporan hasil investigasi oleh UPT KIPM secara berkala;
 - c. Melakukan kegiatan investigasi hasil pengendalian HPIK/ tindakan karantina ke UPT KIPM atau stakeholder apabila dipandang perlu; dan
 - d. Melakukan penyusunan laporan tahunan kegiatan investigasi hasil tindakan karantina yang dilakukan oleh Tim Pusat dan UPT KIPM.

B. Komponen kegiatan

Komponen kegiatan yang mendukung capaian IKU Dokumen Mitigasi Risiko Lalu Lintas Media Pembawa meliputi:

1. Penyediaan bahan kebijakan berupa Petunjuk Teknis Pencapaian IKU Dokumen Mitigasi Risiko Lalu Lintas Media Pembawa;
2. Sosialisasi terkait Petunjuk Teknis Pencapaian IKU Dokumen Mitigasi Risiko Lalu Lintas Media Pembawa dan Juknis Investigasi Pengendalian HPIK/HPI Tertentu;
3. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan;
4. Pengumpulan data dan evaluasi hasil kegiatan investigasi hasil tindakan karantina oleh UPT KIPM;

5. Melakukan investigasi hasil tindakan karantina ke UPT KIPM; dan
6. Melakukan pelaporan berkala (triwulan) dan tahunan capaian IKU Dokumen Mitigasi Risiko Lalu Lintas Media Pembawa.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan pencapaian IKU Dokumen Mitigasi Risiko Lalu Lintas Media Pembawa meliputi:

1. Penyusunan bahan kebijakan; dan
2. Penyusunan laporan hasil kegiatan Investigasi.

BAB IV PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

A. Perencanaan

Dalam rangka pencapaian IKU Dokumen Mitigasi Risiko Lalu Lintas Media Pembawa, perlu dilakukan perencanaan sebagai berikut:

1. Perencanaan di Pusat
 - a. Menetapkan target capaian IKU Dokumen Mitigasi Risiko Lalu Lintas Media Pembawa (Lampiran);
 - b. Menyiapkan anggaran pencapaian IKU Dokumen Mitigasi Risiko Lalu Lintas Media Pembawa;
 - c. Menyusun Petunjuk Teknis Pencapaian IKU sebagai acuan dalam capaian IKU Dokumen Mitigasi Risiko Lalu Lintas Media Pembawa;
 - d. Menyusun Pedoman dan Petunjuk Teknis terkait Mitigasi Risiko Lalu Lintas Media Pembawa;
 - e. Melakukan sosialisasi terkait pencapaian IKU Dokumen Mitigasi Risiko Lalu Lintas Media Pembawa kepada UPT KIPM;
 - f. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - g. Penetapan Tim Pelaksana;
 - h. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait atau narasumber dalam penyusunan bahan kebijakan; dan
 - i. Mengumpulkan informasi/data/laporan kegiatan tanggap darurat tahun 2022.
2. Perencanaan UPT KIPM
 - a. Mengikuti atau berperan serta dalam sosialisasi terkait pencapaian IKU Dokumen Mitigasi Risiko Lalu Lintas Media Pembawa oleh Pusat Karantina Ikan;
 - b. Menyiapkan anggaran kegiatan investigasi hasil pengendalian HPIK/HP I Tertentu atau tindakan karantina;
 - c. Menetapkan Tim Pelaksana untuk melakukan kegiatan investigasi hasil pengendalian HPIK/HPI Tertentu atau tindakan karantina; dan
 - d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan stakeholder pelaksanaan kegiatan investigasi.

B. Pelaksanaan

1. Pelaksanaan di Pusat Karantina Ikan
 - a. Menyusun Petunjuk Teknis Pencapaian IKU sebagai acuan dalam pelaksanaan Mitigasi Risiko Lalu Lintas Media Pembawa, sehingga dapat memperoleh data dan informasi sesuai standar yang diperlukan;
 - b. Menyusun Petunjuk Teknis Investigasi Hasil Pengendalian HPIK/HPI Tertentu;
 - c. Melakukan Sosialisasi terkait pelaksanaan kegiatan Mitigasi Risiko kepada UPT KIPM agar pelaksanaan dapat dilakukan sesuai acuan yang ditetapkan;
 - d. Menyusun bahan kebijakan Mitigasi Risiko Lalu Lintas Media Pembawa;
 - e. Melakukan investigasi hasil pelaksanaan pengendalian HPIK/HPI Tertentu atau tindakan karantina di UPT KIPM;
 - f. Melakukan pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan berkala hasil investigasi yang dilakukan oleh UPT KIPM; dan
 - g. Menyusun laporan kegiatan Investigasi berupa laporan tahunan yang meliputi data kumulatif hasil pelaksanaan investigasi yang

dilakukan oleh Tim Pusat dan evaluasi hasil kegiatan investigasi yang dilakukan oleh UPT KIPM.

2. Pelaksanaan di UPT KIPM

Melakukan kegiatan investigasi sesuai dengan Petunjuk Teknis Investigasi hasil Pengendalian HPIK/HPI Tertentu.

C. Tolok Ukur Keberhasilan

1. Tingkat Pusat

- a. Tercapainya target IKU yaitu 6 (enam) Dokumen Mitigasi Risiko Lalu Lintas Media Pembawa sesuai target yang telah ditetapkan; dan
- b. Terlaksananya kegiatan investigasi, evaluasi dan penyusunan laporan hasil investigasi.

2. Tingkat UPT KIPM

- a. Mampu melakukan dan menyusun laporan hasil investigasi sesuai Petunjuk Teknis Investigasi Hasil Pengendalian HPIK atau pelaksanaan tindakan karantina; dan
- b. Mampu menindaklanjuti rekomendasi hasil investigasi yang disusun oleh Tim Pusat dalam rangka mengurangi risiko lalu lintas Media Pembawa.

BAB V PELAPORAN DAN EVALUASI

Tim Pelaksana kelompok Pencegahan dan Manajemen Risiko berkewajiban untuk segera melakukan pelaporan hasil kegiatan setiap pelaksanaan kegiatan investigasi. Sedangkan pelaporan secara berkala dilakukan setiap 3 bulan (triwulan) sebagai bagian dari pencapaian IKU kelompok Manajemen Risiko, hal tersebut dilakukan agar dapat diketahui progres capaian IKU.

A. Pelaporan

1. Pelaporan UPT KIPM

Tim Pelaksana di UPT KIPM melaporkan hasil kegiatan investigasi sesuai Petunjuk Teknis Investigasi Hasil Pengendalian HPIK/HPI Tertentu.

2. Pelaporan Tim Pusat

a. Pelaporan kegiatan investigasi ke UPT KIPM

1. Dalam hal Tim Pusat melakukan kegiatan investigasi ke UPT KIPM, maka tim pelaksana harus segera menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Sub Koordinator Manajemen Risiko; dan
2. Laporan hasil kegiatan investigasi, menjadi bagian dari laporan berkala (triwulan) pencapaian IKU.

b. Pelaporan Capaian IKU

1. Pelaporan capaian IKU disampaikan secara berkala (triwulan) sebagai bagian dari pencapaian IKU kelompok Manajemen Risiko dan pencapaian IKU Pusat Karantina Ikan.
2. Pelaporan capaian IKU meliputi:
 - a. Laporan capaian Dokumen Mitigasi Risiko Lalu Lintas Media pembawa; dan
 - b. Laporan/evaluasi hasil kegiatan investigasi yang dilakukan oleh Tim Pusat atau UPT KIPM.
3. Pelaporan hasil Investigasi:
 - a. Laporan hasil investigasi sebagai salah satu dokumen capaian IKU adalah berupa laporan tahunan hasil investigasi, yang meliputi data kumulatif hasil pelaksanaan investigasi yang dilakukan oleh Tim Pusat dan UPT KIPM selama tahun berjalan; dan
 - b. Laporan disusun dan disampaikan pada akhir tahun anggaran sebagai bagian dari pencapaian IKU kelompok Manajemen Risiko dan pencapaian IKU Pusat Karantina Ikan.

B. Evaluasi

Dalam rangka pencapaian target IKU dan upaya pengendalian penyakit Tim Pusat dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja masing-masing Tim Pelaksana kegiatan maupun terhadap hasil investigasi. Hal tersebut perlu dilakukan untuk:

- a. memastikan target IKU dapat dicapai serta memberikan rekomendasi perbaikan apabila terdapat kendala didalam pelaksanaannya; dan
- b. memberikan rekomendasi perbaikan apabila ditemukan hasil investigasi yang perlu segera ditindaklanjuti. Dalam hal rekomendasi perbaikan melibatkan pihak lain maka dilakukan koordinasi sesuai dengan tingkat/jenjangnya.

BAB VI PENUTUP

Capaian IKU Dokumen Mitigasi Risiko Lalu Lintas Media Pembawa akan menggambarkan kinerja Puskari dan UPT KIPM dalam mewujudkan misi KKP sekaligus dalam mengemban tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan karantina ikan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019. Keberhasilan dalam pencapaian IKU merupakan bentuk dukungan dalam mewujudkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu “Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Diantaranya dalam upaya peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian Nasional.

Petunjuk Teknis Pencapaian IKU Dokumen Mitigasi Risiko Lalu Lintas Media Pembawa ini akan menjadi acuan dalam penyusunan, evaluasi dan pelaporan sehingga capaian IKU Dokumen Mitigasi Risiko Lalu Lintas Media Pembawa diharapkan dapat tercapai 100% sesuai target yaitu 6 (enam) dokumen. Sedangkan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan investigasi oleh Pusat maupun UPT KIPM yang merupakan bagian dari IKU tersebut akan disusun Juknis tersendiri yaitu Petunjuk Teknis Investigasi Hasil Pengendalian HPIK/HPI Tertentu atau pelaksanaan tindakan karantina.

Dengan tercapainya IKU Dokumen Mitigasi Risiko Lalu Lintas Media Pembawa sebagian amanah UU Nomor 21 Tahun 2019 telah dapat ditunaikan sekaligus sebagai pedoman/acuan dalam pelaksanaan tindakan karantina. Dengan demikian diharapkan tingkat pengendalian HPIK/HPI Tertentu dapat ditingkatkan atau potensi risiko pemasukan/penyebaran HPIK/HPI Tertentu dapat dikurangi.

